



Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

Level of Community Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency

Claudia Indriani¹, Sulaiman Asang², Amril Hans³

^{1,2,3} Departemen
Administrasi Publik,
Universitas
Hasanuddin.
Email:
amrilhans@gmail.com

Keywords: Planning,
Development,
Community
Participation

Kata kunci:
Perencanaan,
Pembangunan,
Partisipasi
Masyarakat

Abstract

In general, this study aims to determine how the level of community participation in development planning in Lembang Pali, Bittuang District. By looking at how the community is involved in every implementation of the development plan deliberation. The basis of this research is a quantitative approach with descriptive quantitative research type. The technique used in data collection is a question naire method and studying data related to research.

Abstrak

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Lembang Pali Kecamatan Bittuang. Dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian secara kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kuesioner dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginanjar, 2006). Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, sehingga dalam penyelenggaraannya daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparansi), partisipasi masyarakat (Demokratisasi) dan pertanggungjawaban masyarakat (Akuntabilitas). Pembangunan berbasis masyarakat mampu menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah bagian dari proses mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat itu sendiri yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi, dengan motivasi serta dorongan yang sepenuhnya sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam pengembangan potensi yang dimiliki suatu masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak seperti penyediaan berbagai masukan serta membuka akses sepenuhnya bagi masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Partisipasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Selanjutnya Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Ndraha T., 1990) juga menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making)

Development Policy and Management Review (DPMR).

Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits)
4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation)

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan secara fisik atau berupa sumbangan tenaga saja namun ada banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap proses pembangunan, karena setiap tahap adalah sebuah kesatuan dalam proses pembangunan dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui serta menentukan apa, bagaimana dan kemana arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut. (Cohen dan Uphof 1979) dalam (Ndraha T. , 1990) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: (1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. (2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek. (3) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. (4) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Sherry R Arnstein (1969) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Jenjang tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi (<i>therapy</i>)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
Penentraman (<i>Placation</i>)	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	

Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	
Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Konsep Perencanaan

Hidayat (2000), mengatakan bahwa tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi beberapa hal antara lain:

1. mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahnya, atau dengan kata lain mengubah hubungan dari politik oposisi ke dialog dan pembagian kewenangan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak
2. mendorong masyarakat dan aparat pemerintah (lintas sektoral) secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah umum yang mereka hadapi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan demokratisasi membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan.

Konsep Pembangunan

(Siagian 2000) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa..

Pembangunan tidak terlepas dari pembangunan dalam setiap tingkatan dari pusat hingga tingkat daerah. Pembangunan pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pembangunan desa. Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, yaitu : (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan keseluruhan pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Adisasmita juga mengatakan bahwa pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan (Adisasmita, 2018)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Peneliti menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan dengan materi penulisan skripsi, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis

untuk mendapatkan data yang objektif. Penelitian dilakukan terhadap variabel tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (1) Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dalam penelitian untuk dijawab. (2) Observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan data dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pali adalah salah satu Lembang atau Desa dari 15 Lembang yang berada di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Lembang Pali memiliki luas wilayah 964,5 Ha, sebagian besar merupakan areal persawahan. Sebagian besar lainnya merupakan lahan pertanian dan sebagian lagi merupakan lahan permukiman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Masyarakat Lembang Pali (data terbaru per/Mei 2020) terdapat 929 jiwa penduduk secara keseluruhan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 270 KK, jumlah penduduk secara keseluruhan kemudian terbagi dalam 5 wilayah Dusun/Lingkungan.

Hasil Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah kuesioner (angket) yang dibuat berdasarkan *Skala Likert*. Menurut (Sugiyono, 2011) *Skala Likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. *Skala Likert* memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Tabel 2. Skor Berdasarkan Skala *Likert*

Pertanyaan/Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein yang terdiri dari 8 tingkatan partisipasi yaitu :*Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control*. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase dari jawaban yang diberikan dari tiap-tiap indikator.

Tabel 3. 8 Level Partisipasi Masyarakat

Level	Penjelasan
<i>Manipulation</i>	yaitu pelaksanaan rencana pembangunan dalam musrenbang yang tidak sesuai dengan realisasi dimasyarakat.
<i>Therapy</i>	yaitu penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada wakil masyarakat tanpa adanya umpan balik.
<i>Informing</i>	dalam tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat, namun hanya sebagai formalitas penyampaian informasi.
<i>Consultation</i>	dalam tahap ini pemerintah berunding dengan masyarakat. Saran dari masyarakat ditampung oleh pemerintah namun keputusan akhir ditentukan oleh pemerintah.
<i>Placation</i>	dalam tahap ini pendapat, saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh pemerintah, namun pelaksanaan program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.
<i>Partnership</i>	pada tahap ini pemerintah menjadikan masyarakat sebagai partner kerja untuk berunding serta bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
<i>Delegated Power</i>	pada tahap ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam menentukan keputusan perencanaan pembangunan.
<i>Citizen control</i>	pada tahap ini masyarakat memiliki kontrol terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam mengevaluasi program-program perencanaan pembangunan.

Tangga partisipasi Arnstein kemudian dikelompokkan berdasarkan derajat wewenang dan tanggung jawab. yang menunjukkan kategori tingkatan kualitas partisipasi tersebut,yaitu:

Tabel 4. Tingkatan Kualitas Partisipasi

Tingkat pembagian kekuasaan	Ukuran Tingkat Partisipasi
<i>Non Participation</i>	Rendah
<i>Tokenisme</i>	Sedang
<i>Citizen Power</i>	Tinggi

Tabel 5. Interval Skor Variabel *Manipulation*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 - 170	Sangat Rendah	-
171 - 340	Rendah	-
341 - 510	Tinggi	489
511 - 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{489}{680} \times 100 = 71.91$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *manipulation* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 489 atau berada pada interval 341 - 510.

Tabel 6. Interval Skor Akumulasi Variabel *Therapy*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 - 170	Sangat Rendah	-
171 - 340	Rendah	-
341 - 510	Tinggi	442
511 - 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{442}{680} \times 100 = 65$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Therapy* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 442 atau berada pada interval 341 - 510.

Tabel 7. Interval Skor Akumulasi Variabel *Informing*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	424
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{424}{680} \times 100 = 62.35$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Informing* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 424 atau berada pada interval 341 – 510.

Tabel 8. Interval Skor Akumulasi Variabel *Consultation*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	435
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{435}{680} \times 100 = 63.97$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Consultation* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 435 atau berada pada interval 341 – 510.

Tabel 9. Interval Skor Akumulasi Variabel *Placation*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	-
511 – 680	Sangat Tinggi	524
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{524}{680} \times 100 = 77.05$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Placation* tergolong sangat tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 524 atau berada pada interval 511 – 680.

Tabel 10. Interval Skor Akumulasi Variabel *Partnership*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	434
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{434}{680} \times 100 = 63.82$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Partnership* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 434 atau berada pada interval 341 – 510.

Tabel 11. Interval Skor Akumulasi Variabel *Delegated Power*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	381
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{381}{680} \times 100 = 56.02$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Delegated Power* tergolong tinggi sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 381 atau berada pada interval 341 – 510.

Tabel 12. Interval Skor Akumulasi Variabel *Citizen Control*

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	322

341 – 510	Tinggi	-
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{322}{680} \times 100 = 47.35$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *citizen control* tergolong rendah sebagaimana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 322 atau berada pada interval 171 – 340.

PEMBAHASAN

Analisis tabel hasil penelitian terhadap tingkat partisipasi masyarakat Lembang Pali dengan menggunakan indikator tangga partisipasi Arnstein di atas menunjukkan bahwa dari 8 tingkat partisipasi Arnstein yang diuji, tingkat partisipasi tahap *Placation* merupakan tingkat partisipasi yang paling dominan diterapkan di Lembang Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Tingkat *Placation* adalah tingkat partisipasi dimana dalam proses perencanaan pendapat, saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat maupun peyampaian pendapat masyarakat lewat lembaga-lembaga masyarakat diterima oleh pemerintah, namun pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Derajat tingkat partisipasi masyarakat Lembang Pali dalam perencanaan pembangunan kemudian diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 13. Pembagian Tingkat Kekuasaan Partisipasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi	Tingkat pembagian kekuasaan	Skor Total
<i>Manipulation Therapy</i>	<i>Non Participation</i>	931
<i>Informing Consultation</i>	<i>Tokenisme</i>	1383
<i>Placation Partnership</i>		
<i>Delegated Power</i>	<i>Citizen Power</i>	1137
<i>Citizen Power</i>		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem perencanaan pembangunan di lembang pali yang diukur dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein berada pada tingkat Placation yaitu tingkat partisipasi dimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sangat terbatas, saran, pendapat dan kebutuhan yang lahir dari masyarakat masih kurang diperhatikan dan tidak menjadi prioritas bahan pertimbangan dalam penentuan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam derajat tingkat partisipasi, Placation berada pada tingkat Tokenisme, yaitu suatu sistem perencanaan pembangunan yang menekankan pada partisipasi pemerintah, meskipun dalam perencanaan pembangunan, pemerintah tidak menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun masyarakat tidak memiliki kebebasan dan terbatas dalam mengekspresikan ide gagasan dan kebutuhan mereka.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan Edisi 2*. Yogyakarta: Expert.
- Arnstein, S. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners* .
- Ginancar, K. (2006). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wisnu Hidayat, N. D., & S, H. N. (2000). *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: Ypapi.